

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia secara geografis memiliki wilayah yang cukup luas dan terdiri dari jutaan barisan pulau-pulau. Berdasarkan hal tersebut, awal digagasnya sebuah Negara yang bernama Indonesia ini, para Bapak Pendiri Bangsa (The Founding Fathers) kita terus memikirkan konsep bernegara yang sesuai diterapkan di Negara yang cukup luas ini, agar tetap dapat menjaga integrasi bangsa satu sama lainnya. Sehingga, lahirlah sebuah konsensus kebangsaan yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni konsep Negara Kesatuan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Agoes Salim<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa Pada umumnya tidak ada yang menginginkan provinsialisme dan separatisme.

“Melainkan mayoritas menginginkan Negara Kesatuan. Sehingga dituangkanlah di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”

Kemudian Menurut Mangkunegara bahwa:

“kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya<sup>2</sup>”

Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai kinerja secara maksimal, oleh karena itu peneliti akan

---

<sup>1</sup> Yudi Latief, 2011, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta, Hal. 336

<sup>2</sup> Yohanis Salutondok, *Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi, Kondisi Kerja Dan Disiplin Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Sekretariat DPRD Kota Sorong*, Jurnal EMBA 849 Vol.3 No.3 Sept. 2015, Manado, hal. 852

meneliti apakah ada hubungan atau pengaruh antara motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja pegawai tersebut. Motivasi dalam pengertian umum, motivasi merupakan dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus menerus dan ada tujuannya<sup>3</sup>. Setiap manusia pada hakikatnya mempunyai sejumlah kebutuhan yang pada saat-saat tertentu menuntut pemuasan, dimana hal-hal yang dapat memberikan pemuasan pada suatu kebutuhan adalah menjadi tujuan dari kebutuhan tersebut.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu wujud atau bentuk reformasi dalam bidang pemerintahan tidak terlepas dari desakan untuk melakukan perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini bersifat sentralistik. Keadaan pemerintahan yang sentralistik tersebut telah berdampak negatif terhadap akselerasi pertumbuhan daerah-daerah khususnya pada daerah kabupaten dan kota. Keberagaman kondisi daerah yang memiliki karakteristik ekonomi, sosial dan budaya yang berbeda-beda, maka hal itu juga yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Tuntutan pemberian otonomi yang luas kepada daerah kabupaten dan kota adalah dianggap wajar paling tidak karena dua alasan yaitu:<sup>4</sup> Intervensi pemerintah pusat terlalu besar di masa lalu yang telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah.

---

<sup>3</sup> Wibowo, *Manajemen Kinerja Edisi Kelima*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2016),hal.322

<sup>4</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta, 2002, hlm. 4

Besarnya peranan pemerintah pusat pada masa itu menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah seringkali menjadikan pemenuhan peraturan sebagai tujuan dan bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan pemberian otonomi daerah juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Pada era seperti itu dimana globalisasi sudah semakin meluas, maka pemerintah akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip antara lain yaitu:<sup>5</sup>

1. Memperhatikan aspek pendewasaan demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah
2. Didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab yang pada daerah kabupaten dan daerah kota sedang provinsi sangat terbatas.
3. Harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjalin hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah.
4. Harus meningkatkan kemandirian daerah otonom.

Untuk melaksanakan tujuan otonomi daerah diperlukan aparatur negara yang berkualitas. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur negara mempunyai peranan yang penting dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sangat tergantung oleh kinerja PNS dan pemimpin.

---

<sup>5</sup> Afan Gaffar Syaukani dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar dan PUSKAP, Yogyakarta, 2003, hlm.8

Suatu organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai tujuan. Organisasi tersebut harus mengelola berbagai dan rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Bagi Sekretariat Daerah sebagai organisasi yang mengemban fungsi koordinasi dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat/instansi pemerintah daerah maka penilaian kinerja bagi aparatur organisasi memiliki arti yang sangat penting terutama dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang akan datang. Penilaian kinerja bagi aparatur berguna untuk menilai kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan, motivasi, dan guna penyesuaian anggaran organisasi.

Analisis terhadap kinerja birokrasi publik menjadi sangat penting atau dengan kata lain memiliki nilai yang sangat strategis. Informasi mengenai kinerja aparatur dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap kinerja aparatur sangat penting untuk diketahui, sehingga pengukuran kinerja aparat hendaknya dapat diterjemahkan sebagai suatu kegiatan evaluasi untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik) merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi), disamping sebagai abdi negara.

Penilaian kinerja aparatur merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu sebagai organisasi publik yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dan memberikan pelayanan administrasi memerlukan informasi mengenai kinerja aparatur yang ada di dalam organisasi, sehingga dapat dilakukan penilaian seberapa

jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi dapat memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa

Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari masyarakat tersebut. Kemudian bagaimana kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah itu dapat terjadi sinkronisasi yaitu saling bersentuhan, menunjang dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Suasana tersebut dapat diciptakan jika aparatur negara memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan profesional dalam pemberian layanan publik.

Secara mental setiap aparat birokrasi, masih ditemukan adanya tradisi dan tata pergaulan yang bersifat paternalisme, misalnya dihadapan pimpinan dinas, seorang aparat bawahan sulit untuk menunjukkan penolakannya atas suatu ide atau gagasan pimpinan. Penolakan atas ide pimpinan secara terbuka dapat berarti membuka konflik antara pimpinan dan bawahannya. Hal ini dapat ditunjukan pada kondisi riil yang ada yakni manakala Pimpinan melakukan Tugas (Dinas) Luar, maka ada anggapan bahwa tugas dan tanggungjawab yang ada pada bawahan dapat ditunda pelaksanaannya atau dengan kata lain bawahan selalu menunggu pimpinan kembali untuk meminta petunjuk kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga pelaksanaan tugas bawahan senantiasa harus dalam pengawasan langsung pimpinan.

Dari berbagai kondisi sumber daya aparatur di Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Sub Bagian Otonomi Daerah Kota Batu tersebut menampakkan bahwa kesiapan pelaksanaan otonomi daerah dalam hal

aparatur belum sepenuhnya terwujud, kinerja pemerintah masih dihadapkan permasalahan-permasalahan tidak efisien, tidak efektif, dan kurang profesional.

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Sub Bagian Otonomi Daerah Kota Batu masih kurang Efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini dilihat dari masih kurangnya jumlah Pegawai yang bertugas di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Sub Bagian Otonomi Daerah Kota Batu sehingga Penyelenggaraan Pemerintahan tidak berjalan dengan baik, sedangkan dari segi kualitas ASN kurang pelatihan dan kemampuan dalam menjalankan tugas pokok dan Fungsi Pemerintahan. Kemudian dari sisi waktu para ASN masih kurang memanfaatkan waktu koordinasi dalam hal administrasi.

Berdasarkan penjelasan saya diatas, maka saya tertarik untuk mempelajari, disamping itu juga dikarenakan saya pernah magang di instansi ini, jadi saya paham bagaimana permasalahan yang ada di instansi Sub Bagian Otonomi Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu. Kinerja Sub Bagian Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu. Oleh karena itu saya melaksanakan Penelitian pada bagian administrasi pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1.2.1 Bagaimana Kinerja Sub Bagian Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu.

1.2.2 Faktor Penghambat Apa Saja Kinerja Sub Bagian Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu.

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

1.3.1 Mengetahui dan memahami Kinerja Sub Bagian Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu.

1.3.2 Mengetahui faktor penghambat Kinerja Sub Bagian Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu.

### **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya Laporan ini diharapkan bisa menambah wawasan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan terutama terkait Kinerja Sub Bagian Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi Lembaga Pemerintahan khususnya Instansi Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu, agar nantinya

peneliti dapat memberikan pemikiran terhadap pemecahan masalah serta mampu menjadi ukuran dalam program yang berkaitan

## **1.5 DEFINISI KONSEPTUAL**

Definisi Konseptual merupakan hal yang sangat penting. Karena menjelaskan arah dan tujuan dari penelitian ini, juga memberikan batasan-batasan pengertian atas istilah-istilah yang ada di judul skripsi ini. Untuk menemukan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, maka penulis menggunakan definisi dari beberapa konsep yang digunakan, yaitu :

### **1.5.1 Kinerja**

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

“Menurut A.A Anwar Prabu Mangkunegara, Kinerja adalah kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.”<sup>6</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja, atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Penilaian prestasi kerja merupakan usaha yang dilakukan pimpinan untuk menilai hasil kerja bawahannya.

Menurut Leon C. Mengginson dalam A.A. Anwar Prabu Mangkunegara:

“penilaian prestasi kerja (performance appraisal) adalah suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Hal 9

<sup>7</sup> Ibid., Hal 10



Kinerja secara umum diartikan sebagai suatu catatan keluaran, hasil suatu fungsi jabatan kerja atau seluruh aktivitas kerjanya dalam periode tertentu.. Secara singkatnya kinerja disebutkan sebagai suatu kesuksesan di dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

### 1.5.2 Otonomi Daerah

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan, Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik beratkan pada aspirasi daripada kondisi.

“Koesoemahatmadja (Rozali Abdulilah,) berpendapat perkembangan sejarah di Indonesia otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*), juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*)<sup>8</sup>.”

Dalam literatur Belanda otonomi berarti pemerintahan sendiri (*zelfregering*) yang oleh Van Vollenhoven (Rozati Abdullah) dibagi atas *zelfwetgeving* (membuat Undang-undang sendiri), *zelfitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindaki sendiri). Pengertian otonomi dengan pemaknaan yang lebih terbatas dan etimologinya, yaitu kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan.

Adapun pengertian otonomi daerah menurut Logeman (dalam Rozali Abdullah,) menyatakan bahwa :

---

<sup>8</sup> Abdullah rozali. 2003, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Fundamental Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Hal 9

“Otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah, dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.”<sup>9</sup>

Tujuan Otonomi Daerah, berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan juga daya saing daerah<sup>10</sup>. Prinsip Otonomi Daerah itu sendiri adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, maka memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah/ Kabupaten / Kota yang didasarkan oleh asas desentralisasi.

### **1.5.3 Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi**

#### **A. Pelaksanaan Tugas**

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi, hal ini sejalan dengan pengertian yang dilakukan oleh The Liang Gie et. Lebih lanjut Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa:

“pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu dituturkan dalam suatu program dan proyek”<sup>11</sup>

Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

“Sedangkan definisi tugas menurut Dale Yoer dalam moekijat The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job” (Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan)”<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid., Hal 10

<sup>10</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>11</sup> Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011.hlm.24

<sup>12</sup> Rivani Alfinita S., *Analisis “Job Description” Pada Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan*, Skripsi, Universitas Hasanuddin . 2012 hlm.9

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa pengertian pelaksanaan dan tugas di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula

## **B. Fungsi**

Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal yaitu :

“Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya”<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian masing-masing dari kata tugas dan fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi tugas dan fungsi (TUSI) tersebut adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitan satu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

---

<sup>13</sup> Nining Haslinda Zainal, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin: Skripsi, 2008 Hal 22

David F. Smith dalam Gibson, Ivancevich, dan Donnelly menjelaskan mengenai hubungan antara pekerjaan pegawai, yang dalam hal ini berupa tugas pokok dan fungsi dengan efektivitas pegawai, bahwa :

“Selain masalah praktis dalam hubungan dengan desain pekerjaan, yaitu berkaitan dengan keefektifan dalam istilah ekonomi, politik, dan moneter, akan tetapi pengaruh yang terbesar berkaitan dengan keefektifan sosial dan psikologis pegawai. Pekerjaan dapat menjadi sumber tekanan psikologis dan bahkan gangguan mental dan fisik terhadap seorang pegawai selain sisi positif dari pekerjaan yaitu dapat menghasilkan pendapatan, pengalaman hidup yang berarti, harga diri, penghargaan dari orang lain, hidup yang teratur dan hubungan dengan orang lain”.<sup>14</sup>

Penjelasan tersebut diatas dapat kita uat kesimpulan bahwa pekerjaan atau pun TUSI yang ditetapkan untuk suatu jabatan sangat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja pegawai. Kinerja pegawai dapat dinilai melalui pelaksanaan tugas-tugasnya maupun fungsinya secara baik dan konsisten. Tugas dan Fungsi pegawai merupakan jabatan langsung dari tugas dan fungsi organisasi kedalam jabatan yang dianalisis. Oleh sebab itu, untuk dapat menghasilkan tugas dan fungsi yang tepat dan jelas demi meningkatkan kinerja pegawai dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

#### **1.5.4 Penyelenggaraan Pemerintahan**

Istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, yakni Pemerintahan menyangkut tugas dan wewenang, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang meneyelenggarakan tugas dan kewenangan pemerintahan. Yang dimaksud dengan tugas adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, artinya, setiap masyarakat dan negara memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya bersifat

---

<sup>14</sup> Gibson, L., James, Ivancevich, M.Jhon, and Donnelly, H.James, Jr. 1993, *Organization, Behavior, Structure, Processes, Tenth Edition*, Irwin McGraw- Hill Inc. USA

statis, sedangkan tugas bersifat dinamis. Seseorang dalam melaksanakan tugas harus mempunyai kewenangan, yaitu hak untuk melaksanakan tugas.

Menurut Surbakti, Pengertian pemerintah dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu dari segi kegiatan (dinamika), struktural fungsional, dan dari segi tugas dan kewenangan (fungsi).

“Apabila dilihat dari segi dinamika, pemerintahan berarti segala kegiatan yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Jika ditinjau dari segi structural fungsional, pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara, yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu demi tercapainya tujuan negara. Kemudian, ditinjau dari segi tugas dan kewenangan negara, maka pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan negara”<sup>15</sup>

Sehubungan dengan pengertian pemerintahan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan fungsi negara, maka perlu dikemukakan pengertian pemerintahan dalam arti luas maupun sempit.

“Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislative, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja”

Penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Kemudian Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, Pemerintahan kolonial, maupun di zaman kemerdekaan. Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan control terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik.

---

<sup>15</sup> Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

## **1.6 DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variable yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variable tersebut yang dapat diamati.<sup>16</sup>

### **1.6.1 Kinerja Sub Bagian Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu**

- A. Penataan Administrasi Sub bagian Otonomi Daerah di bagian administrasi dan otoda sekda kota Batu
- B. Sosialisasi dan Bimtek Sub bagian Otonomi Daerah di bagian administrasi dan otoda sekda kota Batu
- C. Evaluasi dan Analisis kinerja Sub bagian Otonomi Daerah di bagian administrasi dan otoda sekda kota Batu

### **1.6.2 Faktor penghambat Kinerja Sub Bagian Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu**

- A. Kurangnya Sosialisasi Teknologi Informasi terhadap masyarakat
- B. Disiplin yang masih kurang diterapkan.
- C. Pekerjaan tidak berjalan efektif.

## **1.7 METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian ini merupakan sebuah prosedur ilmiah yang harus dilakukan secara sistematis guna mendapatkan data agar dapat menjawab

---

<sup>16</sup> Azwar, Saifuddin: 2003. *Reliabilitas dan validitas*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Hal 74

permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana metoda kualitatif itu sendiri adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu kejadian atau pun fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi antara peneliti dengan objek atau fenomena yang diteliti.

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode Kualitatif bersifat deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

### **1.7.2 Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh penelitian.<sup>18</sup> Subyek penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan sebuah informasi tentang sesuatu yang sedang diteliti. Sebab itu, penelitian ini mengambil subyek sebagai yakni :

- A. Kasubag Otonomi Daerah Bagian Administrasi dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Kota Batu,
- B. Staff Sub Bagian Otonomi Daerah Bagian Administrasi dan Otonomi Daerah Sekretaris Daerah Kota Batu,

### **1.7.3 Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh dari dua sumber, yaitu :

---

<sup>17</sup> Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALABETA hal 225

<sup>18</sup> Arikunto.2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan-Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta. Hal 145

## **A. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.

## **B. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian.

### **1.7.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.<sup>19</sup> Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang bersangkutan dengan penelitian.

Adapun cara mengumpulkan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

#### **A. Observasi**

data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap Lembaga Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu dalam mewujudkan partisipasi masyarakat. Observasi juga dapat diartikan sebagai metode pengumpulan data atau keterangan yang dilakukan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALABETA hal 224

<sup>20</sup> Arikunto.S.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*; (Jakarta:Rineke Cipta,2006). Hal 124



## **B. Wawancara (*Interview*),**

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.<sup>21</sup> Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dan mendalam agar terpenuhinya data yang dibutuhkan oleh peneliti.

## **C. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari teknik maupun organisasi maupun dari perorangan.<sup>22</sup> Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.<sup>23</sup> Dokumentasi merupakan salah satu metode terpenting dalam teknik pengumpulan data karena dokumentasi dapat menunjukkan sebuah fakta atau kebenaran yang terjadi di lapangan.

### **1.7.5 Lokasi Penelitian**

Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu ini berlokasi di Jalan Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65313, Indonesia.

### **1.7.6 Analisis data**

Analisis data kualitatif adalah penggunaan sistematika dari suatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antara kajian dan hubungannya terhadap keseluruhannya.<sup>24</sup> Kegiatan awal dengan menggunakan observasi, kemudian

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*; (Bandung; CV Alfabeta, 2013) hal 231

<sup>22</sup> Ibid., Hal 72

<sup>23</sup> Ibid., Hal 240

<sup>24</sup> Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Askara. Hal. 210

dielngkapi oleh data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen-dokumen atau sumber-sumber lain yang terkait dengan “Kinerja Sub Bagian Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu”. Setelah semua data sudah terkumpul dan sudah ada di tangan peneliti. Maka langkah selanjutnya adalah mengola data-data yang ada kemudian di analisis.

Analisis data merupakan suatu komponen yang penting dalam penulisan ini, analisis data juga mengungkapkan hasil-hasil data yang sudah diperoleh dalam menjawab pertanyaan penelitian. Analisis data sebenarnya adalah suatu proses kegiatan penyederhanaan data ke dalam bentuk tertentu agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Ada berbagai cara untuk menganalisis sebuah data, menurut Habermas dalam Herdiansyah, terdapat langkah dalam menganalisis data yakni:<sup>25</sup>

#### **A. Pengumpulan Data**

Data-data yang sudah diperoleh dan berkaitan dengan penelitian ini dijadikan satu. Langkah ini yakni pengumpulan data-data baik berupa dokumen file, foto-foto maupun wawancara yang peneliti lakukan di Dinas Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Batu serta dijadikan satu untuk dilakukan langkah selanjutnya dalam penulisan ini

#### **B. Reduksi Data**

Setelah data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian penulis, maka dari semua data yang ada dipenulis dipilih lagi secara terperinci dan diambil data-data yang paling relevan keberadaannya dan layak untuk dimasukan kedalam

---

<sup>25</sup> Moeleong, L.J (2011) *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Refsi*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Hal 282

tulisan ini. Langkah ini melibatkan hasil data-data yang paling relevan dari semua dokumen, hasil wawancara maupun foto-foto dari yang penelitian ambil pada lokasi penelitian di Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Bagian Otonomi Daerah Kota Batu.

### **C. Display Data**

Setelah melewati reduksi data maka tahap selanjutnya data yang terpilih akan digabungkan atau dikomplikasikan untuk di deskripsikan menjadi sebuah narasi deskripsi sesuai penulisan ini. Langkah pada tahapan ini yakni data-data yang telah dikumpulkan dan dipilih datanya yang paling relevan baik dari Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Bagian Otonomi Daerah Kota Batu yang berupa wawancara maupun aturan-aturan berbentuk tulisan serta foto-foto dan sebagainya akan digabungkan menjadi satu supaya bias menyempurnakan tulisan.

### **D. Kesimpulan dan Verifikasi**

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari observasi lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode observasi langsung, wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi. Selanjutnya dengan analisis dan interpretasi data akan didapatkan jalan keluar atau pemecahan masalah sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah rekomendasi dan saran guna sebagai langkah penyelesaian atas permasalahan terkait.

